



Mengelola Wisata Bahari di Kota Kendari melalui Prinsip Sustainability dan Blue Economy

INFO PENULIS

Asbi Abdul
Universitas Halu Oleo
asbiadul79@gmail.com

Eliyanti Agus Mokodompit
Universitas Halu Oleo
eamokodompit66@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 3046-8507
Vol. 1, No. 3, November 2024
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2024 Almufi All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Abdul, A., & Mokodompit, E. A. (2024). Mengelola Wisata Bahari di Kota Kendari melalui Prinsip Sustainability dan Blue Economy. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 284-295.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wisata bahari di Kota Kendari dengan menerapkan prinsip keberlanjutan (sustainability) dan ekonomi biru (blue economy). Menggunakan metode deskriptif-kualitatif berbasis library research, studi ini meninjau literatur yang relevan untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam konteks lokal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan yang dapat mengoptimalkan potensi wisata bahari sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip sustainability dan blue economy dapat meningkatkan daya saing sektor wisata bahari di Kota Kendari, meminimalkan dampak lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ekosistem laut. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Wisata Bahari, Sustainability, Blue Economy

Abstract

This research aims to analyse the management of marine tourism in Kendari City by applying the principles of sustainability and blue economy. Using a qualitative method based on library research, this study reviews relevant literature to understand how these concepts can be effectively applied in the local context. The main focus of the research was to identify management strategies that can optimise the potential of marine tourism while preserving the marine environment and improving the welfare of local communities. The results show that the application of sustainability and blue economy principles can increase the competitiveness of the marine tourism sector in Kendari City, minimise environmental impacts, and encourage active community participation in maintaining marine ecosystems. This study is expected to provide policy recommendations that support sustainable marine tourism management in Indonesia.

Keywords: Maritime Tourism, Sustainability, Blue Economy

A. Pendahuluan

Wilayah Kota Kendari terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi wilayah daratannya sebagian besar terdapat di daratan pulau Sulawesi mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat satu pulau yaitu Pulau Bungkutoko. Luas wilayah daratan Kota Kendari 295,89 KM² atau 0,70 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah Kota Kendari dengan ibu Kotanya Kendari dan sekaligus berkedudukan sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa berada di antara 30 54' 30" - 40 3' 11" Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara 1220 23' - 1220 39' Bujur Timur (Sumber: Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Kendari). Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki kekayaan sumber daya laut dan pesisir yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Berbagai keindahan alam, seperti pantai yang bersih, terumbu karang yang indah, serta keberagaman hayati laut, menjadikan Kendari menarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. Selain menawarkan pemandangan alam yang memukau, wisata bahari di Kota Kendari juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dan terstruktur, sehingga masih terdapat tantangan dalam pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Wisata bahari merupakan salah satu bentuk pariwisata yang berfokus pada eksplorasi dan pemanfaatan potensi sumber daya laut, baik dalam bentuk ekosistem, keanekaragaman hayati, maupun kegiatan rekreasi air. Pariwisata ini meliputi aktivitas seperti snorkeling, menyelam, selancar, dan berperahu, yang dapat memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan wisatawan. Selain itu, wisata bahari berpotensi mendukung pelestarian lingkungan laut jika dikelola secara berkelanjutan, dengan memperhatikan dampak aktivitas manusia terhadap terumbu karang, populasi ikan, serta kualitas air laut. Pendekatan pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta regulasi yang ketat dapat meminimalkan dampak negatif pariwisata pada lingkungan laut dan menjamin kelestarian sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Secara definisi, *sustainable tourism* adalah pariwisata yang memerhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Kemenparekraf/Baparekraf memberlakukan pedoman dalam pembangunan destinasi wisata berkelanjutan yang terdiri dari empat kategori, yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, serta pelestarian lingkungan (Atha Hira, 2023).

Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan adalah pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang. Baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Dalam upaya mengembangkan *sustainable tourism*, Kemenparekraf/Baparekraf memiliki empat pilar fokus yang dikembangkan. Di antaranya pengelolaan berkelanjutan (bisnis pariwisata), ekonomi berkelanjutan (sosio ekonomi) jangka panjang, keberlanjutan budaya (*sustainable culture*) yang harus selalu dikembangkan dan dijaga, serta aspek lingkungan (*environment sustainability*).

Sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) merupakan pengembangan konsep berwisata yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan, sosial, budaya, maupun ekonomi lokal. Konsep ini mendorong pariwisata yang berkelanjutan dalam jangka panjang sehingga dapat mempertahankan daya tarik wisata sekaligus melindungi lingkungan alam dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa tanggung jawab utama dari *sustainable tourism*, antara lain: a) melindungi lingkungan, sumber daya alam, dan satwa liar, b) memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah tujuan wisata, c) melestarikan warisan budaya dan menciptakan pengalaman wisata yang otentik, d) menyatukan wisatawan dan komunitas lokal untuk saling menguntungkan, dan e) menciptakan peluang wisata yang inklusif dan mudah diakses (Atha Hira, 2023).

Dalam upaya pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan, prinsip *sustainability* atau keberlanjutan menjadi fondasi penting. Prinsip ini menekankan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestariannya, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam konteks Kota Kendari, penerapan prinsip *sustainability* berarti menjaga ekosistem laut agar tidak rusak oleh aktivitas wisata dan penangkapan ikan yang berlebihan.

Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga kebersihan dan kelestarian laut juga penting agar mereka mendapatkan manfaat ekonomi tanpa merusak sumber daya alam yang ada.

Konsep blue economy merupakan pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan bagi laju pertumbuhan ekonomi, dengan tetap menjaga kesehatan ekosistem laut (Vindaniar Yuristamanda Putri, 2023). Kini, konsep blue economy tidak hanya berfokus pada eksploitasi hasil laut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan, Indonesia memandang blue economy sebagai model yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), blue economy berpotensi menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan. Dengan kekayaan laut yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi biru terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sembari melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ekonomi biru di Indonesia juga memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya melalui sektor perikanan yang menjadi sumber protein utama bagi masyarakat. Dengan mengoptimalkan potensi kelautan, seperti pengembangan akuakultur dan perikanan tangkap berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, ekonomi biru berperan dalam memperkuat industri maritim yang mencakup pembangunan infrastruktur pelabuhan, pengembangan teknologi perikanan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kelautan. Kebijakan yang mendukung ekonomi biru juga membuka peluang bagi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global. Perpres Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021- 2025, di mana pemerintah menetapkan cetak biru Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 yang berbasiskan konsep Ekonomi Biru. (Atifa Zulfa Khoiriyah, 2024).

Agar prinsip sustainability dan Blue Economy dapat diterapkan secara efektif, peran pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata menjadi sangat penting. Pemerintah dapat menginisiasi kebijakan yang mendukung pengelolaan wisata berbasis lingkungan, seperti pengaturan zonasi wilayah konservasi, peningkatan fasilitas pengelolaan limbah, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai dan terumbu karang menjadi kunci dalam menjaga daya tarik wisata bahari Kendari.

Studi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip sustainability dan blue economy dalam pengelolaan wisata bahari untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan wisata bahari tidak merusak ekosistem laut yang menjadi daya tarik utama, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui aktivitas ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis pariwisata, Kota Kendari dapat menjadi contoh pengelolaan wisata bahari yang sukses melalui prinsip sustainability dan Blue Economy.

B. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif dengan berbasis Library Research, yaitu dengan memperhatikan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, website dan dokumen resmi lainnya terkait destinasi wisata bahari. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Kajian literatur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, yaitu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian menganalisisnya dan menarik kesimpulan. Teori yang digunakan oleh peneliti adalah Sustainable Tourism dan Blue Economy untuk menawarkan konsep dalam pengembangan wisata bahari di kota Kendari.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Sustainability dalam Wisata Bahari

Sustainability atau keberlanjutan adalah pendekatan penting dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam sektor pariwisata. Melalui kajian literatur, prinsip keberlanjutan mengajarkan bahwa setiap kegiatan wisata seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ekonomi, dampak lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Dalam konteks wisata bahari, ini berarti setiap aktivitas harus menghindari kerusakan lingkungan laut yang rentan terhadap eksploitasi berlebih, seperti kerusakan terumbu karang akibat aktivitas penyelaman yang tidak teratur.

Pariwisata berkelanjutan adalah salah satu gagasan dari Jost Krippendorf yang berhasil menemukan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pariwisata. Ia lalu mengusung jalan alternatif pariwisata yang lebih ramah lingkungan, ia menyatakan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan di akhir tahun 1980-an berhasil mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi. Keadaan dunia global yang dilanda pandemi selama kurang lebih dua tahun, membuat pemikiran untuk membuat konsep pariwisata yang ramah lingkungan semakin banyak bermunculan. Di Indonesia sendiri, konsep pariwisata berkelanjutan mulai dikenal pada awal tahun 1990-an (Asmoro & Cahyadi, 2022).

Sektor pariwisata dapat berkembang karena adanya interaksi antara bidang sosial, ekonomi dan bisnis yang memiliki fungsinya masing-masing. Selain itu, partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam hal memiliki dan menjalankan apa saja yang harus dilakukan menyangkut kesejahteraannya (Khaeriah, 2021). Pariwisata berkelanjutan memaksimalkan pariwisata dengan lingkungan dan komunitas lokal dengan menekan biaya sebesar-besarnya. Apabila sumber daya dari pariwisata tersebut adalah lingkungan alam, maka dengan adanya pariwisata berkelanjutan adalah bagaimana agar pariwisata tidak sampai merusak lingkungan alam. Pariwisata berkelanjutan dilaksanakan dengan memenuhi rasa tanggung jawab untuk menjaga alam agar dapat digunakan hingga masa yang akan datang. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan sangat mengutamakan konservasi, bermanfaat bagi penduduk lokal dari segi ekonomi dan berpolusi rendah. Untuk melaksanakan pariwisata berkelanjutan, dibutuhkan Kawasan Konservasi Perairan atau Marine Protected Area sebagai salah satu elemen penting dalam pariwisata bahari. Selain Kawasan Konservasi Perairan, budaya masyarakat lokal juga sama pentingnya dan turut serta menjadi hal yang perlu diperhatikan di setiap langkah pembangunan usaha pariwisata berkelanjutan (Nikijuluw et al., 2017).

2. Konsep Blue Economy dalam Pariwisata

Blue economy mencakup beberapa bidang, termasuk pariwisata pesisir laut yang juga menjadi salah satu sektor utama blue economy dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Blue economy diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penggunaan istilah "blue economy" lahir dari Konferensi PBB di Rio de Janeiro, Brazil, tahun 2012 tentang Sustainable Development. Konseptualisasi blue economy ini di antaranya adalah berupa laut sebagai modal alam, laut sebagai sumber untuk hidup, laut sebagai sumber kekayaan baru dan laut sebagai pendorong inovasi. Negara-negara berkembang cenderung lebih banyak yang melihat adanya peluang dalam sektor maritim terhadap pembangunan berkelanjutan. Karena tingkat pendapatan yang rendah, negara-negara berkembang melihat bahwa mereka bisa menekan penggunaan sumber daya laut untuk dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Negara-negara di Kepulauan Pasifik, terutama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang berpenduduk padat, blue economy digunakan untuk memberi model dalam pembangunan berkelanjutan agar bisa menjadi lebih kuat serta bisa menjadi pengaruh bagi masyarakat dalam negeri juga pengaruh pihak luar (Phelan et al., 2020).

Blue economy didasari oleh pembangunan ekonomi dengan menyeimbangkan antara memaksimalkan pemanfaatan sumber daya laut dengan bagaimana dapat tetap mengelola lingkungan dengan optimal. Terdapat tiga strategi yang diterapkan dalam pembangunan blue economy, yaitu penyintasan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, perlindungan terhadap lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini diperlukan agar generasi di masa yang akan datang masih dapat menikmati fasilitas lingkungan yang baik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, untuk mencegah kerusakan lingkungan yang terjadi, diperlukan kesadaran dan pemahaman dari orang lain mengenai pentingnya untuk menjaga lingkungan (Donesia et al., 2023). Konsep blue economy menekan bagaimana hubungan antar lintas kegiatan sektor terhadap manajemen dan sumber daya laut, termasuk di dalamnya bagaimana merancang tata

ruang laut, trade-off lalu lintas antar sektor, berkonsultasi dengan para stakeholder serta menghitung modal dalam menentukan nilai bagi sumber daya alam dan bagi blue financing, yaitu biaya yang harus dikeluarkan dalam membangun promosi untuk memanfaatkan laut secara berkelanjutan (Nasution, 2022).

Blue Economy adalah pendekatan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan laut dan pesisir, dengan cara memanfaatkan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Diberbagai literatur, konsep ini mengajak semua pemangku kepentingan untuk tidak hanya memikirkan keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan kesehatan ekosistem laut dalam jangka panjang. Di Kota Kendari, prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan wisata bahari dengan cara memastikan bahwa kegiatan pariwisata tidak merusak keseimbangan ekosistem dan sumber daya laut tetap lestari.

3. Potensi Wisata Bahari Kota Kendari

Potensi wisata di kota Kendari cukup beragam mulai dari wisata kuliner di sepanjang pesisir teluk, wisata religi masjid terapung (Al-Alam), wisata alam tracking mangrove, jembatan teluk kendari dan berbagai wisata lainnya yang menawarkan panorama indah teluk Kendari dan Kota Kendari secara umum (Bahtiar dkk, 2023). Potensi potensi wisata bahari Kota Kendari seperti (a) Pantai Karang Purirano, (b) Pantai Mayaria Kendari, (c) Kendari Bay Beach, (d) Nambo Beach, (e) Pulau Hari (Haeriyah K, 2019). Artinya bahwa Kota Kendari memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari di Indonesia, didukung oleh kekayaan alam yang melimpah dan letaknya yang strategis di pesisir tenggara Pulau Sulawesi. Pantai-pantai di Kendari, seperti Pantai Nambo dan Pulau Bokori, menawarkan pemandangan yang memukau, pasir putih, serta air laut yang jernih, yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Ekosistem laut di sekitar kota ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti terumbu karang, spesies ikan, dan biota laut lainnya, yang menjadikan Kendari cocok untuk aktivitas snorkeling dan diving. Selain itu, upaya pemerintah setempat dalam mengembangkan infrastruktur pendukung serta mempromosikan destinasi wisata bahari melalui festival dan program keberlanjutan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan potensi ini, Kota Kendari memiliki prospek yang menjanjikan sebagai pusat ekowisata bahari di kawasan timur Indonesia, asalkan didukung oleh pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Potensi wisata bahari tersebut memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Sektor pariwisata bahari mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, dan berbagai kontribusi dari aktivitas ekonomi yang terkait, seperti perhotelan, restoran, dan layanan wisata. Keberadaan destinasi wisata bahari di Kendari tidak hanya menarik wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga menciptakan berbagai peluang usaha bagi masyarakat lokal, seperti penyewaan peralatan snorkeling dan diving, pemandu wisata, serta penjualan kerajinan tangan dan kuliner khas. Sirkulasi pendapatan dari sektor pariwisata ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, investasi dalam infrastruktur pariwisata bahari juga menarik minat investor lokal dan asing, yang lebih lanjut memperkuat perekonomian Kendari sebagai pusat wisata bahari di kawasan timur Indonesia. Dengan pengelolaan dan promosi yang berkelanjutan, sektor wisata bahari dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Kota Kendari.

4. Wisata Bahari dan dampaknya terhadap Ekosistem Laut

Wisata bahari (marine tourism) adalah wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut (seascape) maupun bentang darat pantai (coastal seascape). Di wilayah pantai dapat dilakukan berbagai kegiatan wisata bahari, baik pada bentang laut maupun padabentang darat pantai (Hadi, 2003). Istilah minna wisata (wisata bahari) merupakan salah satu cabang wisata yang berfokus pada pemanfaatan kawasan wisata produksi perikanan dan kelautan secara terintegrasi pada suatu wilayah tertentu berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Kegiatan pariwisata memiliki tiga aspek pengaruh yaitu aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek budaya. Adanya kunjungan wisatawan menyebabkan terjadinya interaksi

sosial antara masyarakat setempat dengan wisatawan yang dapat mengakibatkan perubahan pola atau tata nilai kehidupan masyarakat. Aspek ekonomi terjadi karena terbukanya peluang atau kesempatan kerja di dalam kawasan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. (Mahrus Ali, 2015).

Terbukanya peluang ekonomi pada sektor bahari tentu akan menimbulkan dampak yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari kegiatan pariwisata bahari:

1. Pariwisata bahari dapat menyebabkan polusi di lautan serta kepada lingkungan pantai. Kegiatan lalu lintas laut yang berlangsung secara besar-besaran (massive) dan dalam waktu yang berlangsung lama dapat menjadi penyebab terjadinya polusi di lautan. Beberapa kasus dimana tumpahan minyak dari kapal-kapal menjadi penyebab lingkungan bahari yang terganggu. Sebaliknya, tidak sedikit lingkungan pantai yang kotor karena kegiatan pariwisata atau perilaku wisatawan yang tidak bertanggung jawab.
2. Pariwisata dapat menjadi kerusakan fisik lingkungan serta terganggu kehidupan laut. Lingkungan fisik berupa dasar laut yang memiliki kehidupan karang laut (coral) dapat terganggu karena kegiatan pariwisata bahari yang memanfaatkan kapal-kapal transportasi bagi wisatawan. Kapal-kapal laut yang memasuki suatu wilayah laut yang dangkal tapi memiliki kehidupan laut dapat menjadi penyebab terganggunya kehidupan laut tersebut. Terdapat realita dimana dimana kapal-kapal pesiar yang masuk berlabuh mengganggu lingkungan laut. Hal ini dimaknai sebagai dampak negatif yang dapat terjadi di destinasi wisata yang mengandalkan potensi bahari sebagai penarik wisatawan. Tanpa regulasi yang baik, hal ini dapat terjadi. Selain itu, habitat atau kehidupan laut dapat terganggu dari kegiatan pariwisata yang tidak diorganisir dengan baik.
3. Aktifitas yang dijalankan oleh penduduk lokal dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan juga dapat berdampak negative kepada lingkungan alam. Bagi penduduk yang memberikan pelayanan kegiatan wisata bahari, semakin banyak wisatawan yang dilayani maka semakin meningkat pendapatan yang diperoleh. Sebagai contoh, ketika penduduk lokal akan mengantar wisatawan ke pulau-pulau dalam rangka kegiatan pariwisata, maka penduduk lokal akan bekerja sesuai kebiasaan sehari-hari tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Penggunaan jangkar dengan melemparkan ke dasar laut dapat merusak karang-karang di dasar laut. Tanpa adanya aturan yang mengatur tata cara pelayanan dengan pelestarian alam sebagai tujuan, maka pariwisata bahari dapat menjadi penyebab dampak negative terhadap lingkungan.
4. Perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan analisis dampak lingkungan menjadikan lingkungan alam cenderung disulap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dibandingkan usaha untuk melestarikan keberlanjutan lingkungan. Reklamasi pantai yang tidak melalui proses analisis dampak lingkungan dapat berakibat negative terhadap lingkungan berupa perubahan struktur alam (fisik). Hal ini biasanya dilakukan karena penilaian dari dampak ekonomi pariwisata. Ekspansi pembangunan fisik di wilayah-wilayah pantai dapat memberikan dampak negatif berupa perubahan struktur fisik lingkungan.
5. Kegiatan pariwisata bahari yang tidak memerhatikan aspek daya dukung lingkungan (carrying capacity) dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Jumlah pengunjung (visitors) ke daya tarik wisata bahari dengan jumlah yang tidak berdasarkan pada carrying capacity dapat memberikan dampak negative terhadap lingkungan fisik daya tarik wisata apalagi jika pengunjung tidak berkelanjutan menerapkan (sustainable praktik-praktik practices) dan yang cenderung unsustainable practices (Ilham Junaid, 2018).

Lima hal tersebut di atas menekankan pentingnya pengelolaan wisata yang bertanggung jawab agar dampak negatif terhadap ekosistem laut termasuk di Kota Kendari dapat diminimalkan. Dengan pendekatan sustainability, wisatawan dapat diedukasi untuk menghargai lingkungan laut dan ikut serta dalam menjaga kelestarian alam.

5. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Lokal

Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan kawasan lindung laut dan pariwisata yang berkelanjutan. Ini menekankan bahwa edukasi dan pelatihan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan (Eagles. et. al., 2002). Selain dampak lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam

pengelolaan wisata bahari juga berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi mereka. Peningkatan pendapatan yang signifikan setelah terlibat dalam kegiatan wisata menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang penting bagi masyarakat lokal. Temuan ini mendukung hasil penelitian oleh Dodds, Graci, dan Holmes, (2019), yang menemukan bahwa meskipun ada tantangan signifikan terkait dampak lingkungan dan sosial, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal jika dikelola dengan baik. Strategi-strategi yang diidentifikasi dalam penelitian ini untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, seperti peningkatan edukasi dan pelatihan serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, memberikan panduan praktis untuk pengembangan wisata bahari yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari penelitian Pomeroy dan Douvere (2008), yang menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan dukungan lokal.

Partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka. Studi ini menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Cárcamo, et. al., 2014). menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung laut dapat meningkatkan dukungan lokal dan keberhasilan konservasi. Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif adalah kunci untuk pengelolaan yang berkelanjutan (Hoelting, et.al., 2013).

Sementara itu studi yang dilakukan terkait bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata bahari di Pantai Nambo untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dijelaskan bahwa dengan strategi yang tepat, seperti edukasi, pelatihan, dan dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Dalam konteks literatur yang ada, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata bahari yang berkelanjutan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoretis yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan program pengelolaan wisata bahari di Indonesia dan wilayah lainnya dengan karakteristik serupa (Fathuddin dan Agus Mokodompit, 2024). Selain itu, masyarakat juga senantiasa menyambut wisatawan dengan keramahmatan dan memberikan kehangatan supaya tercipta suasana kekeluargaan dan keharmonisan bagi wisatawan sehingga dapat memberikan kesan dan pelayanan yang memuaskan (Oktaviani Ramenusa, 2016).

6. Peran Pemerintah dalam Upaya Promosi Wisata Bahari

Pada tahun 2017 tingkat pariwisata di kota kendari menurun secara signifikan itu di karenakan kurangnya promosi dan pengelolaan dinas kebudayaan dan pariwisata kota kendari, selain itu juga Penyebab menurunnya jumlah wisatawan juga dimungkinkan akibat makin bertambah banyak objek wisata baru dengan konsep yang sama. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan presentase wisatawan sangat di butuhkan, sehingga pada tahun 2019 dinas kebudayaan dan pariwisata kota kendari mengusung strategi promosi pariwisata kota kendari melalui Duta Pariwisata Kota kendari (Muh. Dachriansyah dkk, 2022).

Upaya promosi yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari yang kemudian akan dijalankan oleh duta pariwisata Kota Kendari tahun 2019 merupakan strategi yang cukup dibilang berhasil, tiga upaya yang dibuat adalah identifikasi trend Wisata modern, sosialisasi mengenai pariwisata, dan promosi wisata melalui media sosial Instagram (Muh. Dachriansyah dkk, 2022). Seperti yang di jelaskan oleh Bapak Drs. Muh. Rafiuddin selaku Kabid Pemasaran Pariwisata. "Di Kota Kendari sendiri banyak tempat wisata yang berpotensi menjadi tempat wisata populer, namun pada tahun 2017 fasilitas dan model Design masih sangat di bilang ketinggalan zaman, Sehingga pada tahun 2019 saat terpilihnya duta pariwisata yang baru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari, melakukan upaya penggunaan duta pariwisata dalam mengidentifikasi tren tempat wisata yang sedang populer atau sedang naik daun" (Wawancara 12 agustus 2021) (Muh. Dachriansyah dkk, 2022).

Dalam mempengaruhi keputusan wisatawan mengunjungi daya Tarik wisata bahari,

terdapat dua cara dalam memanfaatkan media sebagai media promosi. Pertama, pemanfaatan media elektronik, misalnya televisi sebagai media menyampaikan informasi daya tarik wisata pantai ke publik. Pengelola daya tarik wisata dapat membuat film singkat atau short movie mengenai aktifitas bahari yang dilakukan oleh wisatawan. Keindahan alam bahari dapat menjadi perhatian atau fokus film serta berbagai pengaturan (setting) film yang menunjukkan eksistensi potensi bahari suatu destinasi. Pemanfaatan media online (internet) saat ini menjadi media yang paling ampuh untuk mempromosikan eksistensi potensi bahari suatu destinasi. Film singkat dan berbagai informasi dapat dipromosikan melalui internet. Strategi go digital berupa pemberian informasi melalui media internet khususnya media sosial perlu dioptimalkan oleh pengelola daya tarik wisata (Ilham Junaid, 2018).

Yang tak kalah penting dalam mempromosikan destinasi wisata di Indonesia adalah memegang empat prinsip penting dalam kampanye pariwisata yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mencakup: (a) menghormati budaya dan lingkungan, (b) memberdayakan komunitas lokal, (c) meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan keberlanjutan ekonomi. Empat prinsip tersebut harus menjadi pedoman bagi pengembangan sektor pariwisata yang bertanggung jawab dan inovatif (Galih Kusuma dalam <https://mpar.upi.edu/empat-prinsip-dalam-kampanye-pariwisata-yang-berkelanjutan/>).

7. Penyediaan Infrastruktur Berkelanjutan

Dalam Tourism Planning, salah satu infrastruktur dasar yang dianggap penting untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pengembangan pariwisata adalah penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai. Infrastruktur transportasi yang dimaksud bukan hanya berupa jalan raya tetapi berbagai sarana prasarana lainnya yang masih terkait dengan transportasi misalnya lahan parkir, moda transportasi serta berbagai sarana prasarana lainnya. n, perahu, jalan yang baik, papan informasi dan lain sebagainya. Hal yang paling penting adalah penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pariwisata bahari. Jenis infrastruktur ini misalnya: areal parkir, tempat istirahat, rumah makan (Inskeep, 1991).

Pembangunan infrastruktur pariwisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Infrastruktur pariwisata secara kuantitatif menunjuk pada jumlah sarana prasarana yang harus disediakan dan secara kualitatif menunjuk pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan (Tri Risandewi, 2017)

Artinya Bahwa infrastruktur yang memadai merupakan elemen penting dalam perencanaan pariwisata karena dapat mendukung kelangsungan pengembangan sektor pariwisata. Infrastruktur ini mencakup berbagai sarana dan prasarana, seperti lahan parkir, moda transportasi, perahu, jalan yang baik, dan papan informasi dan lain-lain, yang bertujuan untuk menunjang kenyamanan dan kemudahan wisatawan. Selain kuantitas, kualitas infrastruktur pariwisata juga sangat penting, karena mutu pelayanan yang diberikan akan berdampak langsung pada tingkat kepuasan wisatawan. Pembangunan infrastruktur ini harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara jumlah maupun kualitas, untuk menciptakan pengalaman wisata yang memuaskan.

8. Bisnis Wisata yang Ramah Lingkungan

Prinsip-prinsip pariwisata ramah lingkungan meliputi penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan limbah dan polusi, serta pengembangan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Penggunaan sumber daya alam secara bijaksana melibatkan penggunaan energi terbarukan, penghematan air, dan pengurangan limbah. Pelestarian keanekaragaman hayati melibatkan perlindungan dan pemulihan ekosistem serta spesies yang terancam punah (Galih Kusuma dalam <https://mpar.upi.edu/mengenal-konsep-pariwisata-ramah-lingkungan/>)

Pariwisata ramah lingkungan memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal. Salah satu dampaknya adalah peningkatan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang bisnis baru. Dengan adanya pariwisata ramah lingkungan, masyarakat lokal dapat terlibat dalam kegiatan pariwisata, seperti menjadi pemandu wisata, pengelola homestay, atau produsen kerajinan tangan. Selain itu, pariwisata ramah lingkungan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Melalui interaksi dengan wisatawan, masyarakat lokal dapat belajar tentang nilai-nilai lingkungan dan mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan (Galih Kusuma dalam <https://mpar.upi.edu/mengenal-konsep-pariwisata-ramah-lingkungan/>)

Meskipun pariwisata ramah lingkungan memiliki banyak manfaat, ada juga tantangan dan

kendala dalam mengembangkannya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pariwisata ramah lingkungan di kalangan wisatawan dan masyarakat lokal. Banyak wisatawan masih tidak menyadari dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan masih memilih destinasi yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah dan sektor swasta juga menjadi kendala dalam mengembangkan pariwisata ramah lingkungan. Tanpa dukungan yang kuat dari pemerintah dan sektor swasta, sulit untuk mengimplementasikan praktik-praktik pariwisata ramah lingkungan secara efektif (Galih Kusuma dalam <https://mpar.upi.edu/mengenal-konsep-pariwisata-ramah-lingkungan/>)

Pemerintah dan sektor swasta memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pariwisata ramah lingkungan. Pemerintah dapat memberikan insentif dan kebijakan yang mendukung praktik-praktik pariwisata ramah lingkungan, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan regulasi yang membatasi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, seperti pembatasan jumlah wisatawan atau penggunaan sumber daya alam. Di sisi lain, sektor swasta dapat berperan dalam mengembangkan praktik-praktik pariwisata ramah lingkungan melalui investasi dan inovasi. Misalnya, hotel dan restoran dapat menggunakan bahan baku lokal dan organik, serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai (Galih Kusuma dalam <https://mpar.upi.edu/mengenal-konsep-pariwisata-ramah-lingkungan/>)

9. Pengembangan Edukasi Lingkungan untuk Wisatawan

Edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk pengembangan optimal pariwisata ramah lingkungan. Pendidikan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari memperkenalkan konsep pariwisata yang sadar lingkungan, memberikan pelatihan keterampilan pendukung pariwisata, hingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Dengan pendidikan yang tepat, masyarakat akan dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan

Memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan bahwa tidak semua wilayah laut yang ada di suatu destinasi dapat digunakan sesuka hati. Pembagian zonasi wilayah laut di salah satu taman bahari terbesar di Australia (The Great Barrier Reef Marine Park, Australia). zonasi memandu masyarakat dan wisatawan dalam melakukan kegiatan pariwisata. Zonasi yang dimaksud terdiri dari empat bagian sebagai berikut:

1. Zona pelestarian (preservation zone). Zona ini adalah wilayah dimana penggunaan karang laut untuk tujuan-tujuan lain (misalnya untuk tujuan komersial) dilarang. Tujuan pelarangan ini adalah karena wilayah tersebut adalah termasuk zona dilindungi dan dilestarikan.
2. Zone penelitian (scientific research zones). Zona ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian ilmiah namun tetap dalam pengontrolan otoritas setempat.
3. Zona taman nasional bahari (marine national park zones). Pada wilayah ini, pengunjung atau wisatawan dapat memanfaatkannya untuk tujuan rekreasi. Di wilayah ini pula pengunjung diberikan izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi, kegiatan ilmiah serta rekreatif. Zona ini termasuk daerah dimana pengunjung dan masyarakat dapat memanfaatkan dan mempromosikan sebagai lokasi untuk tujuan pariwisata bahari.
4. Zona umum (general use zones). Pada zona ini, kegiatan pemancingan baik yang bersifat komersial maupun untuk rekreatif diperbolehkan. Wilayah ini banyak menjadi pilihan wisatawan yang akan menikmati kegiatan pemancingan (fishing) karena diperuntukkan untuk kepentingan rekreatif dan komersial (Holden, 2008 dalam Ilham Junaid, 2018).

Untuk mendukung hal tersebut di atas maka mengedukasi masyarakat dan wisatawan untuk pariwisata yang bertanggung jawab, berbagai macam cara dapat dilakukan agar pesan edukasi ini sampai ke masyarakat dan wisatawan. Tehnik yang dapat dilakukan untuk mengedukasi masyarakat dan wisatawan dapat melalui media sosial, siaran radio, berita di media cetak dan website. Bantuan dari berbagai lini stakeholders sangat diperlukan, karena menjaga lingkungan dan alam yang merupakan modal yang paling berharga. Dengan kata lain, diperlukan usaha dan kerjasama dari semua stakeholders untuk mengedukasi masyarakat dan wisatawan yang ada di lokasi dalam hal menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak fasilitas (aksi vandalisme), tidak mengambil flora dan fauna yang ada di lokasi objek wisata serta menghindari bahaya kebakaran lahan.

10. Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan

Pariwisata yang berkelanjutan merupakan proses yang kontinu dan membutuhkan pengawasan yang harus dilakukan secara terus menerus terhadap dampak pengembangannya, baik dalam lingkup pencegahan maupun perbaikan pada suatu daerah wisata tertentu (WTO, 2004). Pariwisata yang berkelanjutan bukan hanya sekedar berbicara pada proses perencanaannya, namun produk pariwisata yang dihasilkan harus dapat memberikan tingkat kepuasan yang tinggi dan pengalaman yang bermakna kepada wisatawan (WTO, 2004). Pariwisata telah berekspansi dan mengalami diversifikasi berkelanjutan sehingga menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia (WTO, 2014). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengarahkan pariwisata di Indonesia menuju penerapan konsep pariwisata berkelanjutan. Salah satu langkah tersebut adalah melalui pengaturan yang mewajibkan penerapan pariwisata berkelanjutan di setiap kawasan wisata, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019.

Penelitian Nava Neilulfar Alvi, dkk 2018 terkait evaluasi keberlanjutan wisata bahari pulau Pawang menjelaskan bahwa pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program optimal. Dalam model ini, masyarakat mengambil inisiatif dan terlibat penuh dalam kegiatan mereka, dan keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada rasa tanggung jawab mereka. Selain berkoordinasi dengan masyarakat dan sektor lain, pemerintah juga harus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan wisata bahari Pulau Pahawang, seperti LSM, sektor swasta, investor, perangkat desa. Koordinasi sektoral ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mempromosikan pariwisata berbasis masyarakat di Pesawaran. Hal ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata Pesawaran, termasuk wisata bahari di Pulau Pahawang. Keberlanjutan pariwisata merupakan proses yang berkelanjutan untuk memantau dampak dan menerapkan langkah-langkah pencegahan dalam kegiatan pariwisata.”

Untuk memastikan prinsip sustainability dan Blue Economy diterapkan dengan konsisten, maka perlu evaluasi dan pengawasan berkala. Pemerintah dan pengelola wisata bahari di Kota Kendari harus melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan laut dan dampak dari kegiatan wisata secara berkala. Dengan begitu, segala bentuk aktivitas wisata yang merusak lingkungan dapat segera ditangani, dan kelestarian wisata bahari Kendari dapat terus terjaga.

D. Kesimpulan

Pengelolaan wisata bahari di Kota Kendari melalui prinsip keberlanjutan (sustainability) dan ekonomi biru (blue economy) memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian ekosistem yang menjadi daya tarik utama wisata bahari.

Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata sangat penting, karena dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan menciptakan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Pemerintah juga memiliki peran kunci dalam menginisiasi kebijakan yang mendukung pengelolaan berbasis lingkungan, serta dalam menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan pariwisata.

Dengan pengelolaan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata, Kota Kendari berpotensi menjadi contoh pengembangan wisata bahari yang sukses dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat diadopsi di daerah lain di Indonesia, sehingga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih luas.

E. Referensi

- Ali, M. (2015) Potensi Wisata Bahari Pulau Pasaran Bandar Lampung. *Prosiding Seminar Nasional*
- Asmoro, A. Y., & Cahyadi, H. S. (2022). Pariwisata Berkelanjutan: Analisis terhadap Metode, Topik, dan Aplikasinya pada Jurnal Pariwisata Indonesia. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events*, 1-38.
- Atha Hira, (2023). Apa itu Sustainable Tourism: Definisi, Tujuan & Contohnya. <https://markplusinstitute.com/explore/apa-itu-sustainable-tourism/>

- Atifa Zulfa Khoiriyah. (2024). Implementasi Ekonomi Biru di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8 (2), 2024. P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306
- Bahtiar, dkk. Bakti Teluk Kendari Dalam Rangka "World Clean Up Day 2022". *Jurnal Pengabdian Masyarakat. Meambo*, 2(2), Agustus 2023. e - ISSN : 2961-7200
- Cárcamo, P. F., Garay-Flühmann, R., Squeo, F. A., Gaymer, C. F. (2014). "Using stakeholders' perspective of ecosystem services and biodiversity features to plan a marine protected area." *Environmental Science & Policy*, 40, 116-131.
- Dachriansyah, M., dkk. (2022) Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari Melalui Duta Pariwisata dalam Mempromosikan Pariwisata di Kota Kendari. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 2(2). (November 2022), hlm 190-207 E-ISSN: 2798-3838
- Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Kendari. <https://123dok.com/article/gambaran-umum-kota-kendari-letak-geografis-batas-wilayah.qoo7mo0q>
- Dodds, R., Graci, S., & Holmes, M. (2019). "The Benefits and Challenges of Sustainable Tourism in Coastal Areas." *Journal of Coastal Research*.
- Donesia, E. A., Widodo, P., Saragih, H. J., Suwarno, P., & Widodo. (2023). Konsep Blue Economy dalam Pembangunan Wilayah Pesisir dan Wisata Bahari di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1950-1969.
- Eagles, P. F. J., McCool, S. F., Haynes, C. D. (2002). "Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management." *IUCN Gland, Switzerland and Cambridge*, 253
- Fathuddin dan Agus Mokodompit. (2024). Pengembangan Manajemen Wisata Bahari dan Keterlibatan Masyarakat: Studi Kasus Pantai Nambo, Kendari. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5 (2).
- Galih Kusumah. Empat Prinsip Penting dalam Kampanye Pariwisata yang berkelanjutan. <https://mpar.upi.edu/empat-prinsip-dalam-kampanye-pariwisata-yang-erkelanjutan/>
- Galih Kusumah. Mengenal Konsep Pariwisata Ramah Lingkungan. Magister Priwisata. Universitas Pendidikan Indonesia. <https://mpar.upi.edu/mengenal-konsep-pariwisata-ramah-lingkungan/>
- Hadi, S. (2003). Analisis Pengeluaran Pengunjung Rekreasi Pantai Di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. [Penelitian tidak dipublikasikan]. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.
- Haeriyah K, (2019) Pengelolaan Pariwisata Bahari di Kota Kendari. *Sultra Journal of Political Science*. 1 (1).
- Hoelting, K. R., Moore, M. M., Holland, D. S., Norman, K. C. (2013). "Understanding fishing vessel response to changes in fisheries management: A case study of New England groundfish fishery." *Fisheries Research*, 136, 98-108.
- <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Wisata-Berbasis-Sustainable-Tourism-di-Indonesia>
- Junaid, I. (2018). *Pariwisata Bahari: Konsep dan Studi Kasus*. Politeknik Pariwisata Makassar. ISBN: 978-602-51991-2-7
- Khaeriah, R. H. (2021). Sustainable Tourism Development in Tangerang City: How To Build A Community-Based Ecotourism Concept. *Enrichment: Journal of Management*, 12(1), 542-550.
- Nasution, M. (2022). Potensi dan Tantangan Blue Economy dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Kajian Literatur. *Jurnal Budget*, 7, 340-363.
- Nava Neilulfar Alvi, dkk.(2018) Evaluasi Keberlanjutan Wisata Bahari Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Plano Madani*, 7(1) April 2018, 59-68 © 2018 P ISSN 2301-878X- E ISSN 2541-2973
- Nikijuluw, V. P., Papilaya, R. L., & Boli, P. (2017). *Daya Dukung Pariwisata Berkelanjutan Raja Ampat*.
- Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services: approach for community-based ecotourism: Towrads an equitable and sustainable Blue Ekonomi. *Journal of Sustainable Tourism*, 1665-1683.
- Pomeroy, R., & Douvere, F. (2008). "The engagement of stakeholders in the marine spatial planning process." *Marine Policy*, 32(5), 816-822.
- Putri, V. Y. (2023) Blue Economy sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia. <https://vokasi.ui.ac.id/web/blue-economy-sebagai-strategi-pengembangan->

ekonomi-maritim-di-indonesia/

- Ramenusa, O. (2016). Analisis Lingkungan Pemasaran Potensi Wisata Bahari di Selat Lembeh Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Risandewi, T. (2017) Analisis Infrastruktur Pariwisata Dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata Candirejo Kabupaten Magelang. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Semiloka Kelautan Menjelang Otonomi Daerah, Kerjasama Pemda Cilacap dengan Departemen Perikanan dan Kelautan; 25 Nopember 2000 di LP. Nusakambangan, Kabupaten Cilacap.
- Swasembada Pangan Politeknik Negeri Lampung 29 April 2015. ISBN 978-602-70530-2-1 halaman 568-575 UK.
- Waryono, T. (2000). Aspek Pengembangan Desa Wisata Nelayan Kampung Laut Segara Anakan, Cilacap.
- WTO. (2004). Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook. Madrid: UNWTO.
- WTO. (2014). UNWTO Tourism Highlights. Madrid: UNWTO